



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ZAENI MIFTAH**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **964723**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 11.760.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/56 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 684 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/252 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 794 m2/63 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/150 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
8. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m2/500 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/215 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 43.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.



9.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.795.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 90.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 13.688.000.000**III. HUTANG** Rp. 1.215.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 12.473.000.000**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.